



LKjIP

Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah

Tahun 2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta seluruh aparat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejarah, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan

Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 28 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Cascading.....	5
C. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	6
D. Dukungan Anggaran.....	11
E. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	11
F. Isu Strategis.....	12
G. Sistematika Pelaporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	23
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	26
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik berserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai

peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2022.

B. CASCADING

Misi K2 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Serta Mewujudkan Kepentingan yang Inklusif dan Berkeadilan																			
TUJUAN 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Dapat Bertanggung Jawab dan Dapat Berprestasi																			
INDIKATOR TUJUAN : Indeks Kelembagaan Birokrasi																			
SARANAN / SPASID/TUJUAN RENCANA : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dengan program publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi																			
INDIKATOR SARANAN / SPASID/TUJUAN RENCANA : Indeks SPBE																			
URUSAN STATISTIK				URUSAN KEMUNICIPATAN DAN INFORMASI								URUSAN PERENCANAAN							
BIDANG STATISTIK DAERAH/UMUM PUBLIK				BIDANG SPBE				BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI				BIDANG PERENCANAAN							
SP1. BERTINGKATNYA DATA STATISTIK BERKUALITAS YANG BERSEDIAAN SP1.1. Perumusan Analisa Data Statistik yang dibutuhkan				SP2. BERTINGKATNYA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERSEDIAAN SP2.1. Tingkat Keterbacaan Layanan Publik/ Layanan Publik SP2.2. Responsivitas Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dibutuhkan SP2.3. Perumbuhan konten media yang dibutuhkan				SP3. BERTINGKATNYA TINGKAT KEWAKILAN KAPASITAS PROSES SPBE SP3.1. Tingkat Keterbacaan Publikasi/ Tinjauan SPBE SP3.2. Tingkat Keterbacaan/ Pemanfaatan Aplikasi SPBE				SP4. BERTINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI (TI) SP4.1. Penerimaan pengguna saat ini terhadap infrastruktur TI				SP5. BERTINGKATNYA STANDARISASI SISTEM ELEKTRONIK SP5.1. Tingkat Keterbacaan/ Pemanfaatan Aplikasi/ Layanan			
P1. Program Pengembangan Statistik Daerah P1.1. Perumusan Analisa Data Statistik yang dibutuhkan				P2. Program Informasi dan Komunikasi Publik P2.1. Perumusan kebijakan daerah yang dibutuhkan P2.2. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P2.3. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE				P3. Program Aplikasi Informatika P3.1. Perumusan Kebijakan yang dibutuhkan P3.2. Perumusan kebijakan SPBE yang dibutuhkan P3.3. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.4. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.5. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.6. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.7. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.8. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.9. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE P3.10. Perumusan kebijakan yang dibutuhkan SPBE				P4. Program Pengembangan Pemanfaatan Sistem Pemanfaatan Teknologi P4.1. Perumusan Kebijakan Cyber							
K1. Pengembangan Statistik Daerah di Lingkungan Daerah Kabupaten Kota Jumlah Asesmen dan pemantauan pelaksanaan SAsi Data Jumlah OPD yang melakukan atau mengup-date secara berkala Tingkat Keterbacaan Layanan Data Terbuka				K2. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Jumlah Pemusatan yang dilakukan Jumlah kegiatan sosialisasi ke berbagai instansi Jumlah kegiatan sosialisasi ke berbagai instansi Jumlah informasi yang dihasilkan dan diunggah Jumlah informasi yang dihasilkan dan diunggah				K3. Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Jumlah jumlah pemusatan SPBE yang dibuat dan diunggah Jumlah jumlah Pemusatan SPBE yang dibuat dan diunggah Jumlah indikator SPBE yang dibuat dan diunggah Jumlah aplikasi yang dibuat dan diunggah Tingkat Keterbacaan Publikasi SPBE Tingkat Keterbacaan Pemanfaatan Aplikasi SPBE				K4. Pengembangan Nama Domain yang Terdaftar dan Pemenuhan Pasokan dan SAsi Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Kapasitas Baseline server untuk pemenuhan pasokan Jumlah OPD yang melakukan atau mengup-date secara berkala Tingkat Keterbacaan Layanan Data Terbuka				K5. Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Jumlah OPD yang melakukan atau mengup-date secara berkala Tingkat Keterbacaan Layanan Data Terbuka Jumlah Pemusatan yang dilakukan Jumlah Pemusatan yang dilakukan			
BK1. Kurangnya Dan Berkurangnya Pemenuhan, Jaring Dan Diakses Data Statistik Secara Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Pengembangan Sistem dan Pemenuhan Data dan Pemenuhan Data Statistik Secara Berkala Jumlah OPD yang melakukan atau mengup-date secara berkala	BK1. Pengembangan Infrastruktur Jumlah infrastruktur yang dibutuhkan	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala	BK1. Jumlah Dan Dan Asesmen Data Jumlah dokumen yang dihasilkan dan diunggah secara berkala				

C. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

“Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian”.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

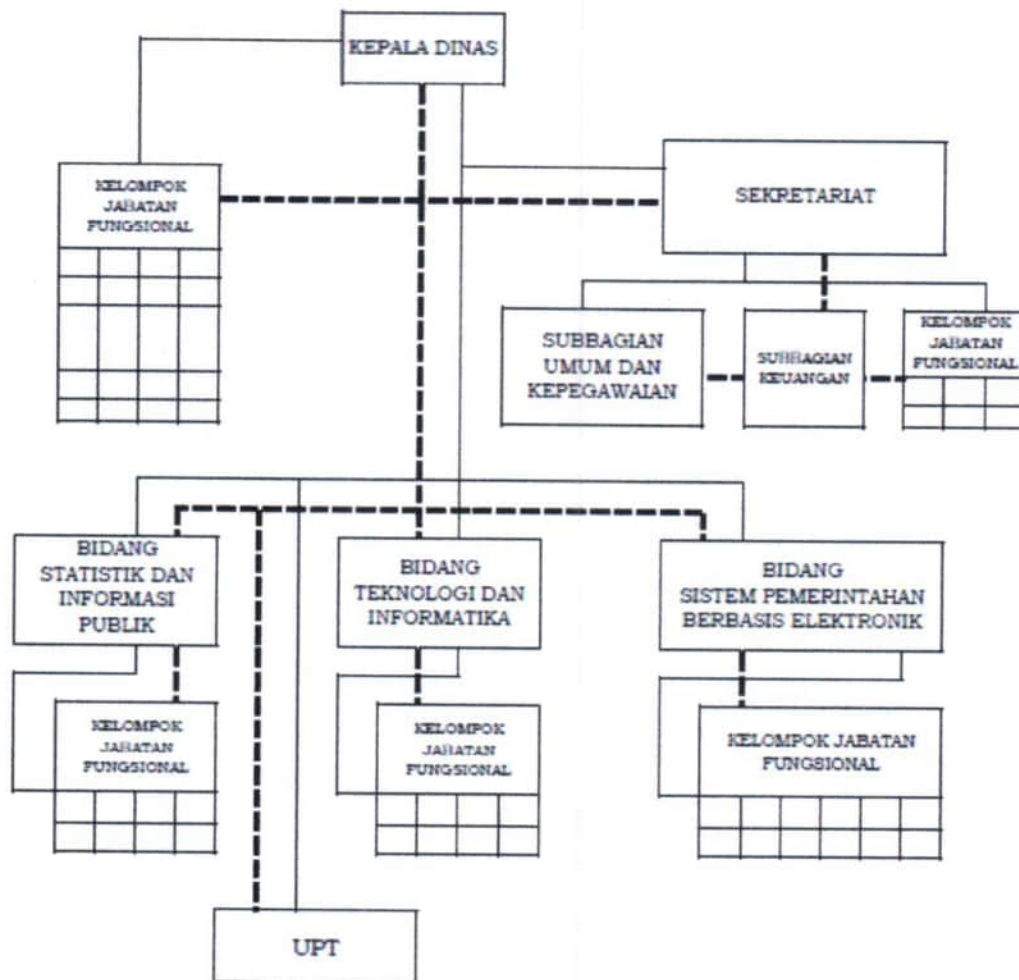
- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Perencana Ahli Muda;
3. Bidang Statistik dan Informasi Publik, terdiri atas :
 - a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - b. Sandiman Ahli Muda;
5. Bidang SPBE, terdiri atas :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - b. Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c. Pranata Komputer Ahli Pertama;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK



4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari pegawai struktural dan kelompok jabatan fungsional sebanyak 31 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2022)

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	9
3	Bidang Teknologi dan Informatika	8
4	Bidang Statistik dan Informasi Publik	9
5	Bidang SPBE	4
Total		31

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2022)



Tabel 1.2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (per 31 Desember 2022)

NO	URAIAN Pangkat / Golongan Ruang	PENDIDIKAN								JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)									
	Juru Muda Tingkat I (I/b)									
	Juru (I/c)									
	Juru Tingkat I (I/d)									
2	Pengatur Muda (II/a)			1						1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)									
	Pengatur (II/c)					6				6
	Pengatur Tingkat I (II/d)									
3	Penata Muda (III/a)						8			8
	Penata Muda Tingkat I (III/b)									
	Penata (III/c)						1			1
	Penata Tingkat I (III/d)						5	3		8
4	Pembina (IV/a)						1	4		5
	Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
	Pembina Utama Muda (IV/c)							1		1
	Pembina Utama Madya (IV/d)									
	Pembina Utama (IV/e)									
	JUMLAH	0	0	1	0	6	15	9		31

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
(per 31 Desember 2022)

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I			
II	4	3	7
III	6	11	17
IV	3	4	7
Jumlah	13	18	31

D. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Supriyono, 2022). Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, mencapai target kinerja sebanyak 3 urusan strategis dengan 17 indikator kinerja, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berjumlah Rp. 14.706.186.525,00. Dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2021 sebesar Rp. 11.944.870.277,00 naik sebesar Rp. 2.761.316.248,00 atau 23,18%.

E. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor X.700/1208/437.72/2022 Tanggal 27 Juni 2022, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Penerapan pengukuran kinerja telah digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (*refocusing*) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
2. Penyajian informasi kinerja ke depannya akan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
3. Informasi kinerja telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

F. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Permasalahan utama atau isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
2. *Data Center/* Ruang Server;
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan IT;
4. Keamanan Informasi;
5. Satu Data Kabupaten;

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan rencana strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Gresik.

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian **Misi ke-1** yaitu *"Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel serta Mewujudkan Kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif"*. Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas, maka ditetapkan **Tujuan Ke-1** yaitu, *"Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas berdasarkan Good and Clean Governance"* diukur dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan **Sasaran ke-1** sebagai berikut : *"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi"* dengan indikator kinerja yang diampuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang lebih optimal dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan pengunjung website	5% ~ 445309 dari 424104 viewers	5% ~467575 dari 445309 viewers	5% ~ 490953 dari 467575 informasi	5% ~ 515501 dari 490953 informasi	5% ~ 541276 dari 515501 informasi	5% ~ 568340 dari 541276 informasi
2			Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	5% ~ 2541 informasi dari 2.420 informasi	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi	5% ~ 2801 informasi dari 2668 informasi	5% ~ 2941 informasi dari 2801 informasi	5% ~ 3088 informasi dari 2941 informasi	5% ~ 3242 informasi dari 3088 informasi
3			Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	4	4	4	4
4		Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 100 / 100 data	100% ~ 105 / 105 data	100% ~ 110 / 110 data	100% ~ 115 / 115 data	100% ~ 121 / 121 data	100% ~ 127 / 127 data	
5		Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang di Integrasikan	28.57% (2/7 data)	42.86% (3/7 data)	57.14% (4/7 data)	71.43% (5/7 data)	85.72% (6/7 data)	100% (7/7 data)	
6		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)	100% (48 OPD dan 26 kelurahan)
7		(TI), keamanan sistem elektronik, dan data	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2	2	3	4	4
8			Tingkat Kematangan Layanan Jaringan	2	2	3	4	4	4

		terintegrasi	Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah						
9			Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	3	3	4	4	4
10			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1	3	3	4	4
11			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	3	3	4	4	4
12			Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	3	4	4	5	5
13			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	2	2	3	3	4
14		Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	4	4	4	4	4
15			Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	4	4	4	4
16			Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	2	3	3	4	4
17			Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2	2	2	3	3

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Gresik guna mewujudkan target kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan Pengunjung Website	5% ~467575 dari 445309 viewers
		Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	5% ~ 2668 informasi dari 2541 informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
		Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 105 / 105 data
		Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	42.86% (3/7 data)
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
		Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4
		Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Gresik sebesar Rp. 14.706.186.525,- terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan;

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;
3. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.241.425.680	APBD
2	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.106.748.400	APBD
3	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Rp. 4.817.962.985	APBD
4	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 92.920.460	APBD
5	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian	Rp. 447.129.000	APBD
JUMLAH			Rp. 14.706.186.525	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Gresik tahun 2022. Pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 < 100%	Sangat Tinggi
2	76 < 90%	Tinggi
3	66 < 75%	Sedang
4	51 < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 secara umum berjalan dengan baik. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan Pengunjung Website	5% ~467.575 dari 445.309 viewers	10.96% (494.099 dari 445.309)	219,2%
		Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	5% ~ 2.668 informasi dari 2.541 informasi	14.33% (2.905 dari 2.541)	286,6%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	100%
		Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 105 / 105 data	112.38% (118 dari 105)	112,38%
		Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	42.86% (3/7 data)	42.86% (3 dari 7)	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97.3% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	4	200%
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3	150%
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3	2	66,67%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	2	200%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	2	66,67%
		Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1	50%
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	2	50%
		Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	2	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 melalui 3 (Tiga) sasaran strategis dan 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja sasaran/utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik ditunjang dengan anggaran Belanja. Pagu APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun 2022 sebesar **Rp 14.706.186.525,00** (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Pada bulan Maret 2022 mengalami pengurangan pada anggaran DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga menjadi sebesar **Rp 13.706.186.525,-** (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Pada Triwulan IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mengalami perubahan Anggaran dengan adanya penambahan PAK sebesar Rp 1.462.797.740,- (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) dan pergeseran anggaran DBHCHT dilimpahkan ke Satpol PP sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga total

anggaran DBHCHT yang bergeser dari APBD sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Pagu akhir PAPBD tahun 2022 menjadi sebesar **Rp 14.668.984.265,-** (Empat Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Pagu tersebut di atas untuk melaksanakan 3 urusan, 5 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi".

Pada sasaran strategis 1, "Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan" memiliki 5 indikator kinerja, dan seluruhnya memiliki pencapaian yang sangat baik (100% ke atas) dari target yang ditetapkan. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, dapat dilihat mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2021 ada 1 indikator kinerja tidak tercapai, namun tahun 2022 tercapai semua. Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2021 dan 2022 Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada **Tabel 3.3** berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan Pengunjung Website	5% ~ 445.309 viewers dari 424.104 viewers	6,97% ~ 453.684 viewers dari 424.104 viewers	139,4%	5% ~467.575 dari 445.309 viewers	10.96% (494.099 dari 445.309)	219,2%
		Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	5% ~ 2.541 informasi dari 2.420 informasi	28,6% ~ 3.112 informasi dari 2.420 informasi	572%	5% ~ 2.668 informasi dari 2.541 informasi	14.33% (2.905 dari 2.541)	286,6%
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	3	75%	4	4	100%
		Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100% ~ 100/100 data	104% ~ 104/100 data	104%	100% ~ 105 / 105 data	112.38% (118 dari 105)	112,38%
		Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	28.57% (2/7 data)	28,7% ~ (2/7 data)	100%	42.86% (3/7 data)	42.86% (3 dari 7)	100%

Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mempertahankan capaian 5 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan”, guna memberikan pelayanan optimal dan efektif bagi masyarakat Gresik pada umumnya.

Saat ini, keterbukaan informasi memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gresik, sehingga penyebarluasan informasi harus lebih dioptimalkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik membentuk satu wadah internal yang diberi nama Gresik News Room, yang bertujuan untuk menjangkau informasi terupdate, serta menyaring berita hoax terkait kegiatan pemerintahan. Saat ini masyarakat, terutama kaum milenial memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah seperti website Kabupaten Gresik (gresikkab.go.id), akun IG pemkabgresik, IG suaragresik, *channel youtube* Suara Gresik, *channel youtube* Diskominfo Gresik dan layanan komunikasi berbasis elektronik lainnya. Berbagai pilihan layanan komunikasi dan informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik secara terus menerus diharapkan dapat diterima dan dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Gresik.

Gambar 3.1

Website [gresikkab.go..id](http://gresikkab.go.id), YouTube Suara Gresik, IG kominfogresik







Kukuhkan KKD, Strategi Pemkab Gresik Tangkal Dampak Negatif Pesatnya Perkembangan Internet.



Disukai oleh **kominfogresik** dan **101 lainnya**
pemkabgresik Kukuhkan KKD, Strategi Pemkab Gresik Tangkal Dampak Negatif Pesatnya...
selainkannya



Jatim Kominfo Festival

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi".

Pada sasaran strategis 2, "Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi" memiliki 8 indikator kinerja, dan 5 di antaranya tercapai dan 3 tidak tercapai. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, terdapat penurunan capaian kinerja. Tahun 2021 semua indikator kinerja tercapai, namun tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator yang mengalami penurunan adalah indikator yang terdapat dalam pengukuran indeks SPBE. Dinas Kominfo bersama dengan OPD lainnya telah berupaya mencukupi dokumen penilaian indeks SPBE yang diminta, akan tetapi ada beberapa hal yang digarisbawahi menjadi penyebab turunnya capaian 3 indikator kinerja ini, yaitu :

- a. Beberapa aplikasi eksiting belum memerlukan integrasi data;
- b. Tahun 2022 masih fokus untuk collecting datadengan metadatanya. Proses manajemen data masih perlu pembahasan lebih lanjut pada Forum Satu Data;
- c. Dokumen penilaian terkait Manajemen Keamanan Informasi kurang lengkap.

Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2021 dan 2022 Sasaran Strategis 2 dapat dilihat pada **Tabel 3.4** berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	97% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	97% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	100%	97% (46 OPD dan 26 kelurahan)	97.3% (46 OPD dan 26 Kelurahan)	100%
		Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2	100%	2	4	200%
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	200%	2	3	150%
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	2	100%	3	2	66,67%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1	100%	1	2	200%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1	100%	3	2	66,67%
		Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	2	100%	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1	100%	2	1	50%

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2022 guna mencapai sasaran strategis ke-2 "Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem Elektronik, dan Data Terintegrasi" adalah sebagai berikut :



Bimtek Kesiapsiagaan penanganan Cyber di Blitar



SID di Kecamatan Manyar



Launching CSIRT Kabupaten Gresik



SID Kecamatan Cerme



Konsultasi Keamanan Informasi ke Provinsi

Untuk meningkatkan kinerja sasaran strategis pada tahun yang akan datang diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Integrasi data akan dilakukan sesuai kebutuhan, kemudian dilakukan sosialisasi dan pendampingan lebih intens kepada OPD yang memerlukan sistem penghubung;
- b) Koordinasi lanjutan tentang Manajemen Data dengan melibatkan BPS, Walidata dan Bappeda, serta Forum Satu Data;
- c) Permintaan dokumen kebutuhan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi akan dicukupi lebih lengkap.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Sasaran strategis ini juga merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi".

Pada sasaran strategis 3, "Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE" memiliki 4 indikator kinerja, 3 di antaranya tercapai dan 1 tidak tercapai. Jika membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, terdapat penurunan capaian kinerja. Tahun 2021 semua indikator kinerja tercapai, namun tahun 2022 terdapat 1 indikator kinerja yang tidak tercapai. Indikator yang mengalami penurunan adalah indikator yang terdapat dalam pengukuran indeks SPBE. Dinas Kominfo bersama dengan OPD lainnya telah berupaya mencukupi dokumen penilaian indeks SPBE yang diminta, akan tetapi ada beberapa hal yang digarisbawahi menjadi penyebab turunnya capaian 1 indikator kinerja Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE ini, yaitu tidak melibatkan semua Perangkat Daerah.

Pengukuran Realisasi Kinerja tahun 2022 Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	4	100%	4	2	50%
		Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	100%	3	3	100%
		Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3	300%	2	2	100%
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2	200%	2	2	100%



Fasilitasi Ranperda Smartcity di Biro Hukum Provinsi



Aplikasi Gresikpedia, One Data One Portal Open Access

Untuk meningkatkan kinerja sasaran strategis pada tahun yang akan datang diupayakan melakukan perbaikan SK Tim Koordinasi SPBE dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan mengevaluasi Kinerja Tugas Tim Koordinasi SPBE secara berkala.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yaitu Indeks SPBE. Target Capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah 3,19 dan terrealisasi sebesar 3,27. Dengan demikian capaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik adalah 102,51%. Walaupun demikian, Capaian Indeks SPBE ini mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Beberapa indikator dibatasi nilai maksimal 3 dari 5 karena adanya kebijakan Tim Koordinasi SPBE Nasional;
- b. OPD pemangku Indikator tidak menyertakan eviden dengan lengkap dan sesuai permintaan;
- c. Penilaian Indeks SPBE 2022 tidak menggunakan interview (hanya pemantauan eviden) sehingga tidak ada kesempatan untuk perbaikan atau menjelaskan tentang eviden yang disampaikan;
- d. OPD pemangku Indikator belum memasukkan target Indikator SPBE menjadi Indikator Kinerja OPD.

C. REALISASI ANGGARAN

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 3 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)				
				PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Pertumbuhan Pengunjung Website	219,2%	2.393.888.860,-	2.336.341.669,-	97,60%	2,4%
		Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	286,6%				
		Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	100%				
		Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	112,38%				
		Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	100%				
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika (TI), Keamanan Sistem	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	100%	4.809.123.725,-	4.786.679.589,-	99,53%	0,47%

	Elektronik, dan Data Terintegrasi	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	200%				
		Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	150%				
		Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	66,67%				
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	200%				
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	66,67%				
		Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	100%				
		Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	50%				
		3	Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	50%	1.350.840.000,-	1.339.691.819,-
Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	100%						
Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	100%						
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	100%						
JUMLAH				8.553.852.585,-	8.462.713.077,-	98,93%	1,07%

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2022, anggaran PAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang digunakan untuk mencapai target indikator sasaran strategis/kinerja utama sebesar **Rp 8.553.852.585,-** (Delapan Milyard Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), terrealisasi sebesar **Rp 8.462.713.077,-** (Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ekivalen 98,93% dengan efisiensi **Rp 91.139.508,-** (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah) ekivalen dengan 1,07%. Efisiensi ini diperoleh dari sisa belanja jaringan internet, honorarium tenaga ahli statistik dan penyiar yang resign, belanja jasa masyarakat untuk kegiatan sosialisasi aplikasi pengaduan (WadulGus) yang tidak dilaksanakan, serta sisa dari belanja modal pengadaan/jasa konsultasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat realisasi yang telah dicapai, maka secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target, dari 17 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja, ada 13 indikator kinerja sasaran yang kinerjanya sama dengan atau lebih dari 100% sehingga mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi belanja daerah PAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebesar Rp 8.553.852.585,- dan Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 8.462.713.077,- atau 98,93%. Capaian Indeks SPBE sebesar 3,27 dari target sebesar 3,19. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya

solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran kinerja tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK



Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650807 199703 2 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 27 Januari 2022

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640924 198703 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	1	Pertumbuhan Pengunjung Website	5 persen
		2	Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	5 Persen
		3	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
		4	Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100 Persen
		5	Persentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	42.86 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	1	Presentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	97 Persen
		2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
		3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
		4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
		5	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
		6	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
		7	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
		8	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4
		2	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
		3	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,241,425,680	APBD
2	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 2,106,748,400	APBD
3	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 4,817,962,985	APBD
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 92,920,460	APBD
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 447,129,000	APBD
Jumlah			Rp. 14,706,186,525	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 27 Januari 2022

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dr. SITI JAIYAROH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640924 198703 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 31 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.


Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Informasi Pemerintahan dan Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	1	Pertumbuhan Pengunjung Website	5 persen
		2	Pertumbuhan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dipublikasikan	5 Persen
		3	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
		4	Presentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	100 Persen
		5	Presentase Data Sektoral (Layanan Perangkat Daerah) yang Diintegrasikan	42.86 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	1	Presentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	97 Persen
		2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
		3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
		4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
		5	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
		6	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
		7	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
		8	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
3	Meningkatnya Tingkat Kematangan kapabilitas proses SPBE	1	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4
		2	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
		3	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,115,131,680	PAPBD
2	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 2,294,026,760	PAPBD
3	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 5,712,834,725	PAPBD
4	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 99,862,100	PAPBD
5	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 447,129,000	PAPBD
Jumlah			Rp. 14,668,984,265	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

Gresik, 31 Oktober 2022

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.


Dra. NINIK ASRUKIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650307 199703 2 003



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

GRESIK

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2021 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1208/437.72/2022
Tanggal : 27 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/843/437.72/2022 Tanggal 9 Mei 2022.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten

mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Rencana Aksi Tahun 2021 serta dokumen terkait lainnya.

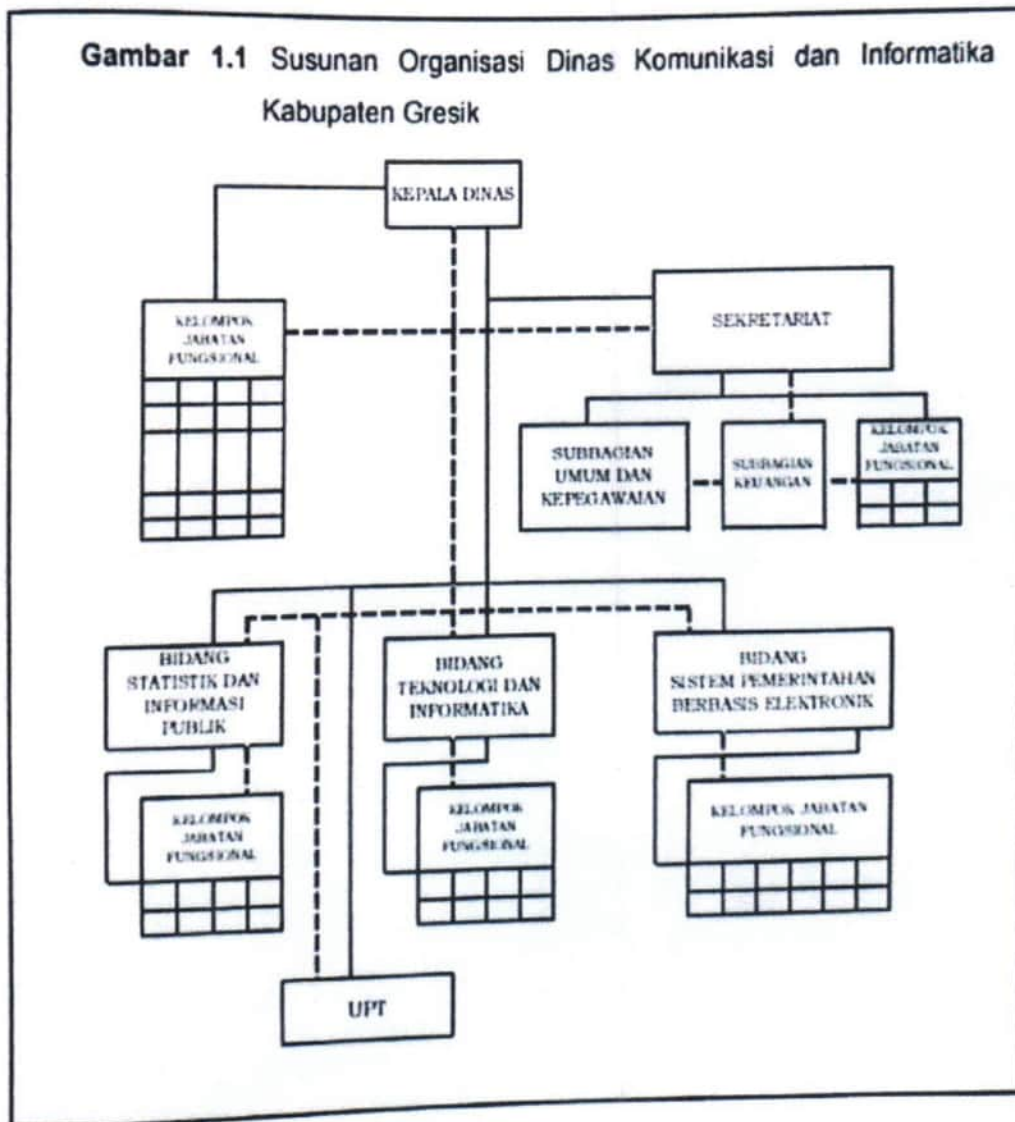
Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	<p>Sangat Memuaskan</p> <p>Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</p>
A (Nilai > 80 – 90)	<p>Memuaskan,</p> <p>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p>
BB (Nilai > 70 – 80)	<p>Sangat Baik,</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator</p>
B (Nilai > 60 – 70)	<p>Baik,</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
CC (Nilai > 50 – 60)	<p>Cukup (memadai),</p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja</p>
C (Nilai > 30 – 50)	<p>Kurang,</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>
D (Nilai > 0 – 30)	<p>Sangat Kurang,</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

- e. Metodologi dan Teknik Evaluasi
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
 2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga perangkat daerah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai berikut :



Adapun jumlah SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 berdasarkan jabatan dan jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Strata 3 (S3)	1
2	Strata 2 (S2)	8
3	Strata 1 (S1)	16
4	SMA	1
5	Tenaga Harian Lepas	32

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran sebesar Rp.11.944.870.277 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh empat delapan ratus ribu tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Jumlah (Rp.)
Jumlah Pendapatan	
BELANJA	
BELANJA OPERASI	10.149.385.627
Belanja Pegawai	3.592.142.000
Belanja Barang dan Jasa	6.557.243.627
BELANJA MODAL	1.795.484.650
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.791.220.450
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.264.200
Jumlah Belanja	11.944.870.277
Total Surplus/(Defisit)	(11.944.870.277)

Pada Triwulan IV Diskominfo Mendapat tambahan Anggaran PAK sebesar Rp.4.395.269.242,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) Sehingga anggaran PAPBD Tahun 2021 Menjadi sebesar Rp.15.364.785.569,- (lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah), Pagu belanja tersebut di atas ditujukan untuk melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan (termasuk DBHCHT).

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pencapaian target maupun luaran yang dihasilkan.

- h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun belum secara optimal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 86,79 dengan kategori A (Memuaskan).

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	27,86
b. Pengukuran Kinerja	30%	25,00
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,93
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
Jumlah	100%	86,79

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 2612 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi dan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **92,86%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Nomor 2612 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading kinerja). Namun sampai dengan dilakukannya evaluasi, untuk dokumen

Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum diupload di website Pemerintah Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 100% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 12,86 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00, atau 85,71% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 25,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 83,33% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan)

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja seharusnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas, anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun pada realisasinya pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam penyesuaian organisasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 66,67% dengan kategori peringkat B (Baik).

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,93 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 92,86% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviudan disampaikan tepat waktu namun sampai dengan dilakukan evaluasi oleh Tim Inspektorat dokumen LKjIP belum diupload di website Pemerintah Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan)

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke

depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dengan menggunakan Teknologi Informasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 100% dengan kategori peringkat AA (**Sangat Memuaskan**).

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menindaklanjuti untuk atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan telah terjadi perbaikan dengan memanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja namun belum secara optimal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 60,00% dengan kategori peringkat CC (**Memadai**).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

- a. Penerapan pengukuran kinerja supaya digunakan untuk mempengaruhi baik pada penyesuaian (refocusing) organisasi maupun penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- b. Penyajian informasi kinerja supaya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
- c. Informasi kinerja supaya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- d. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



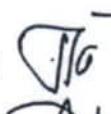


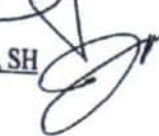
III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan perolehan nilai sebesar **86,79** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK

EDY HADISISWOYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si
NIP.19700708 199803 1 004 
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 
3. DARWIS, SH
NIP. 19660519 199501 1 001 
4. ROSARI LASTIYONO U. SE
NIP.19801007 201101 1 005 
5. DAVID CAHYONO, SH
NIP.19890506 201903 1 006 
6. JOHAN HADIPRADANA E. SH
NIP.19900719 201903 1 004 



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

GRESIK

Gresik, 27 Juni 2022


Nomor : X.700/WS/437.72/2021 2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gresik.

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik
di-
GRESIK

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, maka diminta saudara agar memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut untuk dapatnya meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dan terarah

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK



EDY HADISISWOYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680503 199703 1 011

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN RPJMD
TAHUN 2022**

Kinerja Tujuan		4	Indikator Tujuan
Interval	Nilai	Jumlah	Persentase
91% < 100%	ST	4	100%
76% < 90%	T	0	0%
66% < 75%	K	0	0%
51% < 65%	R	0	0%
< 50%	SR	0	0%
N/A	N/A	0	0%

No	Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022			NILAI	Perangkat Daerah	Sumber Data	Formulasi/ Penjelasan	Permasalahan/ Tindak Lanjut
						Target	Realisasi	Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menetapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berakhil, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif	Menghidupkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	69.40	69.40					Bagian Ortala- Setda	Data Tertakhir Tahun 2020		
2	Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Merata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2.68	2.585					Dappeda	DEPUTI PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI Nomor : D-307/II/RI/12/2021 tentang Hasil Penelitian Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2021		
3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah	Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	-3.68%	3.79	2-3	7.38	240%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS		
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Indeks Pembangunan Manusia	76.10	76.50	76.31	77.16	98.53%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS		
5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan	Tingkat Kemiskinan	12.4	12.42	10.7 - 11.5	11.06	100.00%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS		
			Tingkat Pengangguran Terbuka	8.21	8.00	7.2	7.84	108.89%	ST	Dinas Komunikasi dan Informatika	BPS		



Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DR. NINIK ASRUKIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650307 199703 2 003

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2022



No	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Peningkat Daerah	Sumber Data	Pembahasan/Pengjelasan	Permasalahan/Tindak Lanjut
					TARGET	Realisasi	TARGET	Capaian (%)				
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkeadilan, Akuntabel, Serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Keberlanjutan	Membudayakan Tata Kelola Pemerintahan Berkeadilan, Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dan Berkeadilan, serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Keberlanjutan	Meningkatkannya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan dengan pelaksanaan jufuk yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50	3,31	3,19	3,27	100,01%	ST	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kementerian	Capaian indeks SPBE tahun 2021, walaupun sudah meningkat target capaian tahun 2021. 1. Bekerja bersama dengan mitra masyarakat dan swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. OPD sebagai indikator untuk memantau dengan langkah apa saja yang dilakukan. 3. Fokus pada SPBE 2022 untuk meningkatkan indeks sebagai tolak ukur kemampuan untuk perbaikan atau perbaikan yang sedang berlangsung. 4. OPD sebagai indikator untuk memantau target indikator SPBE menjadi indikator kinerja OPD.
3	Mewujudkan Kemajuan, Ekonomi yang Sumbang Akhir Rakyat dan Akhir Masyarakat	Mengajukan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Ekonomi Akhir Rakyat dan Akhir Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	3,7%	3,101	3,17%	3,17%	100% / 100% Kemampuan dan Informatika			

Kepala Dinas, Kabupaten
KEPADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Drs. ARIK ASRIKIN, M.M.
 NIP. 196.503.07.19703 2 003

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KENSTRA TAHUN 2022

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	2022	TARGET	Ketepatan	Capaian	Sumber Data	Penyusunan	Solusi
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kemampuan kapabilitas proses SIPRE	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Tingkat kemampuan pelaksanaan tim koordinasi SIPRE	4	4	4	4	Tidak tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Tidak melibatkan semua Perangkat Daerah dan mengacu Tim Koordinasi SIPRE dengan Tim Koordinasi Perubahan SK	
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kemampuan kapabilitas proses SIPRE	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Tingkat kemampuan kolaborasi pemerintah SIPRE	1	5	3	3	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Melakukan Perubahan SK Tim Koordinasi SIPRE dengan melibatkan semua Perangkat Daerah	
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kemampuan kapabilitas proses SIPRE	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Tingkat kemampuan pengembangan aplikasi SIPRE	1	3	2	2	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE		
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya tingkat kemampuan kapabilitas proses SIPRE	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Tingkat kemampuan pengawasan manajemen layanan SIPRE	1	2	2	2	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE		
25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya informasi pemertan dan data statistik yang dipublikasikan	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemertan pengunjng website pada Tahun (n) - jumlah pengunjung website pada Tahun (n-1) (Bergi jumlah pengunjng website pada Tahun(n))	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	Tercapai	Google analytic	Google analytic		
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya informasi pemertan dan data statistik yang dipublikasikan	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemertan yang dipublikasikan jumlah informasi yang dipublik pada Tahun (n) - jumlah informasi yang dipublik pada Tahun (n-1) (Bergi jumlah informasi yang dipublik pada Tahun(n))	38,60%	38,60%	38,60%	38,60%	Tercapai	Laporan pemertan informasi publik	Laporan pemertan informasi publik		
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatnya informasi statistik yang dipublikasikan	STATISTIK	Meningkatnya informasi publik yang dipublikasikan	4	4	4	4	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE	Laporan Hasil Pemantauan SIPRE		



No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	Target	Realisasi	2022	Capaian	Nilai	Sumber Data	Pemutakhiran	Skala		
78	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemertahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	INDIKATOR SASARAN	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan Tahun n dibagi total data statistik sektoral (dengan target rencana peningkatan 3 % dari Tahun n-1).	95 data yang dipublikasikan	101%	100% (105/100 data)	112,38% (118 dari 105)	118 dari 105	Tercapai	Data.gresdikab.go.id					
79	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	STATISTIK	Meningkatnya informasi pemertahan dan data statistik sektoral yang dipublikasikan	INDIKATOR SASARAN	Jumlah Data Sektoral yang dipublikasikan dibagi Jumlah Seluruh Data Sektoral (T data) x 100%	11,28% (1/7 data)	25,57%	42,68% (3/7 data)	42,68% (3 dari 7)	42,68% (3 dari 7)	Tercapai	Data warehouse					
80	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Jumlah perangkat daerah dan kabupaten yang terhubung dengan jaringan dibagi jumlah total perangkat daerah dan kabupaten x 100%	65% (46-OPU)	97% (46-OPU) dan 26 Kabupaten	97% (46-OPU) dan 26 Kabupaten	97,3% (46-OPU dan 26 Kabupaten)	97,3% (46-OPU dan 26 Kabupaten)	Tercapai	Laporan jaringan					
81	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Persentian tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval: 1. Rintisan 2. Terkadang 3. Terdefinisikan 4. Terpadu dan terarah 5. Optimum	2	2	2	4	4	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemempuamb					
82	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Persentian tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval: 1. Rintisan 2. Terkadang 3. Terdefinisikan 4. Terpadu dan terarah 5. Optimum	2	4	2	3	3	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemempuamb					
83	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Persentian tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval: 1. Rintisan 2. Terkadang 3. Terdefinisikan 4. Terpadu dan terarah 5. Optimum	2	2	3	2	2	Tidak tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemempuamb	Beberapa aplikasi ekshibeg sudah ada dan beberapa lebih lanjut yang akan dilakukan	Beberapa aplikasi ekshibeg sudah ada dan beberapa lebih lanjut yang akan dilakukan	Integrasi data akan dilakukan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan pengembangan pada UPT yang memerlukan sistem penghubung		
84	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Persentian tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval: 1. Rintisan 2. Terkadang 3. Terdefinisikan 4. Terpadu dan terarah 5. Optimum	1	1	1	2	2	Tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemempuamb					
85	DIKAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANJARAN	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur Teknologi Informatika (TI), keamanan sistem elektronik, dan data terintegrasi	INDIKATOR SASARAN	Persentian tingkat kematangan berdasarkan fakta, analisa, dan justifikasi dengan interval: 1. Rintisan 2. Terkadang 3. Terdefinisikan 4. Terpadu dan terarah 5. Optimum	1	1	3	2	2	Tidak tercapai	Laporan Hasil Pemantauan SPBE Kemempuamb					

Tahun 2022 fokus untuk collecting data dengan ketersediaan layanan berbasis Proves Manajemen Data masih perlu dibahas di BPS, Walidata dan Bappenas, serta forum satu dengan Bappenas sebagai koordinator forum.

No	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2020	2021	2022	Sumber Data	Permasalahan	Solusi
----	------------------	--------	---------	-------------------	-----------	------	------	------	-------------	--------------	--------

86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANIKAN	Meningkatnya kualitas layanan informasi Teknologi Informasi (TI) dan data terintegrasi	Tingkat Keseluruhan Layanan Publik	Perencanaan target berdasarkan justifikasi dengan interval: 1. Rentan 2. Terlokak 3. Terdeteksi 4. Terpadu dan terukur 5. Optimum	2	2	3	Laporan Hasil Pemantauan SPPE	Tertinggi		
87	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERSANIKAN	Meningkatnya kualitas layanan informasi Teknologi Informasi (TI) dan data terintegrasi	Tingkat Keseluruhan Persebaran	Perencanaan target berdasarkan justifikasi dengan interval: 1. Rentan 2. Terlokak 3. Terdeteksi 4. Terpadu dan terukur 5. Optimum	1	1	2	Laporan Hasil Pemantauan SPPE	Tidak tercapai	Perencanaan dan tidak dapat menggapai kebutuhan pelayanan pendidikan dan tidak dapat menggapai kebutuhan pelayanan dan tidak dapat menggapai	



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DRS. NINIK ASHURIN, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196809171997032003

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022



URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2020	2021	2022			Pemasalahan	Tindak Lanjut
						TARGET 2022	Realisasi 2022	Capaian		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya sasaran program OPD	Person	84,26%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM INFORSIASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengabdian layanan publik yang difasilitasi	Person	90,54% (267/317)	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM INFORSIASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jema informasi publik penyirnggaraan pemerintah yang dipublikasi	Person	N/A	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM INFORSIASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemindaian data yang difasilitasi (PDI)	Person	100% (3/3)	100% (3/3)	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Dokumen Kebijakan yang diunggah yang diunggah	Person	N/A	100% (1/1)	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Indikator SPBE yang diunggah	Person	100% (37/37)	100% (47/47)	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam Pemantauan SPBE	Person	N/A	84% (31/46)	75% (36/48)	100%	133%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Sidas Pembangunan Adiklat	Person	N/A	0 (1/15)	13% (2/15)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	Person	N/A	0 (2)	30% (10/46)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen Ruang Sektoral	Person	25% (13 OPD / 48 OPD)	35% (17 OPD / 48 OPD)	31% (15/48)	124%	124%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Analisis Data Sektoral yang disusun	Person	N/A	7% (2/30)	13% (4/30)	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANTIAN UNTUK PENGAMBIAN INFORMASI	Pengembangan Strategi Cyber	Person	100%	100%	100%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase OPD yang Menerapkan Manajemen Aset TI	Person	N/A	0%	2%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase OPD yang Meringkaskan Sistem Penghubung Layanan	Person	N/A	0%	2%	21,7% (10/46)	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM APLIKASI INFORSIATIKA	Persentase data terlokasi yang dipertukarkan	Person	N/A	0%	2%	100%	100%	ST	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	No	Uraian Penerimaan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Capaian	Target	Realisasi	Permasalahan	Uraian Monev/Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa	Kerangka Sisa Anggaran			
															Belang	Efektif	Tidak Dilaksanakan	
1	05	2.02	09		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AKSESIBILITAS KAPAL/PERKOTA CEPIDAS DAN KOTA CEPIDAS	1. FGD Pemetaan Smart City 2. Jumlah Riset Cetakasi Smart City	8 7 3	9 7 3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	05	2.02	09		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH	Rapat OPD yang Berbasis pada Platform Penerimaan (4 x 48 OPD) Isa kontribusi Pengabdian Layanan SPIE Pengembangan Single sign on Pembangunan Aplikasi Hibrida Jumlah Perbaikan Maintenance Jaringan OPD Jumlah Pelatihan Manajemen data	48 1 1 1 2 kali 2 kali	1 1 48			213.234.000	213.511.001	1.722.096	1.722.096	4.099.075	4.099.075		
2	02	3.01			PROGRAM PENYELINGGARAN STATISIK SEKTORAL	Pemeriksaan Analisis Data Sektoral yang diteliti	13 % (4/30)	13 % (4/30)				95.862.100	82.374.972	17.483.128	17.483.128			
3	02	3.01			PERYELINGGARAN STATISIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Data Sektoral tingkat OPD yang diteliti	4	4				95.862.100	82.374.972	17.483.128	17.483.128			
4	02	3.01			KOORDINASI DAN WERKHOUDING DAN PENYULUHAN, PRODUKSI, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISIK SEKTORAL	Jumlah bingkai statistik	2	3				95.862.100	82.374.972	17.483.128	17.483.128			
2	21	05			PROGRAM PENYELINGGARAN PELAKSANAAN UPTUK PENGAMBIAN INFORMASI	Prosentase Penanganan Serangan Cyber	100%	100%				447.129.000	445.508.593	1.620.407	1.620.407			
2	21	05			PERYELINGGARAN PELAKSANAAN UPTUK PENGAMBIAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase OPD yang Melakukan Manajemen keamanan Informasi	50% (24/47)	100% (46/46)				447.129.000	445.508.593	1.620.407	1.620.407			
3	21	05			PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUKAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Jumlah OPD yang telah melakukan Rerang keamanan Informasi (Jurnal Cyber Security) Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	58 OPD 2 Pelatihan	58 OPD 2 Pelatihan				137.950.000	137.943.000	7.000	7.000			
4	21	05			PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA BERBASIS ELECTRONIC DAN NON ELECTRONIC	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Firewall yang digunakan Jumlah Laporan SSL Jumlah maintenance email gateway Jumlah maintenance Firewall yang dilakukan Jumlah Sosialisasi dan koordinasi Jumlah Tenaga Ahli yang direkrut	1 kali 1 Unit 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Orang	1 kali 1 Unit 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Kali 1 Orang				305.179.000	307.565.533	1.613.407	1.613.407			

Maaf ketidahu,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DR. H. HENDRIK HENDRIK, M.M.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembina Utama Madya
No. 199/2022/2.003

